

**ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN  
PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**OLEH**

**SYAHRIN RAMADHANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 M/1445 H**

**ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN  
PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Magister  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Syahrin Ramadhana  
220211050108**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrin Ramadhana  
NIM : 220211050108  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarbaru, 01 Januari 1999  
Program : Magister Pascasarjana  
Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 1 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,  
anda tangan



METERAI  
TEMA  
9AB4ALX017762656

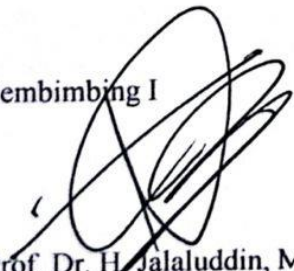
Syahrin Ramadhana

## PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul : Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian  
PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak  
Asasi Manusia  
Ditulis oleh : Syahrin Ramadhana  
N I M : 220211050108  
Program : Magister Pascasarjana  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 01 Januari 1999  
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Komp. Mandastana V, No. 01


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I

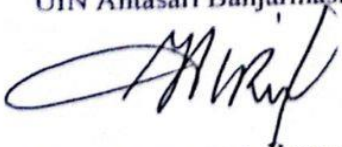
  
Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP 196611261991021002

Banjarmasin, 3 Juni 2024

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag.  
NIP 196605041994032002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Program Magister Pascasarjana  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.  
NIP 196703271992032005

## PENGESAHAN

### ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

SYAHRIN RAMADHANA

NIM: 220211050108

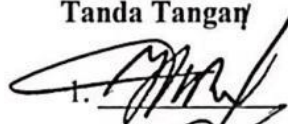
Telah Diajukan pada Dewan Penguji  
Pada: Hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024

**Dewan Penguji**

**Nama**

**Tanda Tangan**

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI  
(Ketua/ Anggota)

1. 

2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
(Anggota)

2. 

3. Prof. Dr. Hj. Mariani, SH. M.Ag  
(Anggota)

3. 

4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
(Sekretaris / Anggota)

4. 

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.**

## ABSTRAK

**Syahrin Ramadhana.** 2024. "Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Keluarga, Pembimbing: (I) Prof. Dr. HLM. Jalaluddin, M.Hum. (II) Dr. Hj. Mariani, SHLM., M.Ag.

**Kata Kunci:** Izin Atasan, Perceraian PNS, Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap pasangannya diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan mereka. Sebaliknya, jika seorang PNS menerima gugatan perceraian dari pasangannya, mereka juga harus memberitahukan secara tertulis kepada atasan mereka dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja setelah menerima gugatan tersebut. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mematuhi persyaratan izin dalam melangsungkan perceraian, tindakan tersebut bisa mengakibatkan sanksi. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jika seorang PNS tidak memberikan laporan tentang perceraian dalam kurun waktu paling lambat satu bulan sejak terjadinya perceraian, PNS tersebut dapat dikenai salah satu hukuman disiplin yang berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pns yang melakukan perceraian.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami konsep-konsep tentang bagaimana aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada hukum Islam dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa aturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan atau menerima gugatan perceraian dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Aturan ini bukanlah campur tangan sembrono dalam kehidupan pribadi, melainkan upaya untuk memastikan bahwa tindakan PNS selaras dengan norma moral dan etika yang diamanahkan oleh agama. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur sanksi disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan terkait perceraian tanpa izin. Sanksi disiplin berat ini mencakup penurunan pangkat, pemindahan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS, baik dengan hormat maupun tidak.

## **MOTTO**

*“Apa yang kita kira itu sebuah cobaan yang pahit seringkali menjadi berkah yang tersamarkan.” – Oscar Wilde*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Rabbil Aalamin*, sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya persembahkan Tesis ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama dan sejauh ini.

Terimakasih atas kerja kerasnya, mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Tesis ini juga saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Mama dan Abah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga selama ini.

Tentunya, tiada kata yang bisa saya selipkan

Selain kata maaf dan terima kasih

Untuk semua orang yang pernah hadir kebersamaan di masa-masa penuh perjuangan.

Dan untuk yang selalu memberikan doa, semangat,

Serta kasih sayang yang tulus,

Saya ucapkan terima kasihlm.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta&gt;d</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. HLM. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.HLM.I. dan Tuti Hasanah, S.Ei, M.Hi., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. HLM. Jalaluddin, M.Hum dan Dr. Hj. Mariani, SHLM., M.Ag., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan tesis.
4. Prof. Dr. HLM. Akhmad Fauzi Aseri, M.A., selaku Pembimbing Proposal Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 1 Juni 2024

Penulis,

Syahrin Ramadhana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikasi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>30</b>
A. Perceraian dalam Hukum Islam .....	30
B. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .....	50
C. Konsep <i>Sadd adz-dzariah</i> .....	58
D. Teori Tujuan Hukum .....	71
E. Hak Asasi Manusia.....	77
<b>BAB III PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA.....</b>	<b>96</b>
A. Pegawai Negeri Sipil .....	96
B. Pengaturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia .....	105
C. Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	113
D. Sanksi PNS yang Tidak Meminta Izin dalam Perceraian .....	118

<b>BAB IV ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA.</b>	<b>120</b>
A. Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia .....	120
B. Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Perceraian .....	145
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>151</b>
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran-saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>158</b>